



Upaya Pemenuhan Kebutuhan Logistik Pertahanan pada Masa Revolusi di Sumatera Barat, 1945-1949

Logistics Provision for the Defense during the Indonesian Revolution in West Sumatra, 1945-1949

Albertus Hutagalung*, Universitas Andalas, Indonesia

Nopriyasman, Universitas Andalas, Indonesia

Gusti Asnan, Universitas Andalas, Indonesia

ABSTRACT

This study investigates efforts to meet the needs of defense logistics during the Indonesian Revolutionary War in West Sumatra. The research emphasizes the strategic role of West Sumatra in the struggle for independence. The main question is how local fighters and communities managed to secure and distribute essential supplies, such as food, weapons, and ammunition, under inadequate conditions. Using historical methods, this study analyzes primary and secondary sources, including archival documents and official reports. The qualitative analysis aims to reconstruct the logistics operations and adaptive measures undertaken by the local population. The findings show that despite limited local resources, fighters employed a variety of innovative strategies. These efforts were crucial in maintaining supply chains and ensuring the sustainability of defense logistics. In conclusion, this study argues that success in war is largely determined by the ability to manage and meet logistical needs.

ARTICLE HISTORY

Received 05/07/2024
Revised 13/07/2024
Accepted 26/07/2024
Published 18/08/2024

KEYWORDS

Indonesian Revolutionary War; West Sumatra; defense logistics; supply chain management.

*CORRESPONDENCE AUTHOR

✉ albertroshat21@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.30743/mkd.v8i2.9561>

PENDAHULUAN

Kajian periode revolusi Indonesia kembali populer seiring berkurangnya saksi sejarah dan kompleksitasnya sebagai babak penting dalam perjalanan bangsa. Satu hal yang menarik adalah bahwa Indonesia dan Belanda memiliki dua wajah revolusi. Bagi Indonesia, revolusi merupakan masa perjuangan mempersatukan bangsa dan meraih kemerdekaan. Bagi pihak Belanda revolusi adalah suatu upaya menghancurkan negara bentukan Jepang dan memulihkan kembali rezim kolonialnya di Indonesia. Hal ini ditegaskan Moerdiono dalam bukunya "*Denyut Nadi Revolusi Indonesia*", bahwa meskipun memiliki dua makna yang berbeda bagi Indonesia dan Belanda, periode revolusi ini secara historis memang diwarnai kekacauan di berbagai wilayah Indonesia (Moerdiono, 1997, p. 3). Hal ini menjadi salah satu faktor yang menarik perhatian banyak sejarawan, baik dari dalam maupun luar negeri, yang beberapa dekade terakhir menjalin kerja sama antara sarjana Indonesia dan Belanda di antaranya proyek penelitian "*Independence, Decolonization, Violence and War in Indonesia, 1945-1950*". Program riset ini menghasilkan karya tentang realitas historis yang terjadi di Indonesia dari perspektif Belanda yang belum banyak dibahas oleh historiografi Indonesia (Limpach, 2023; Oostindie, 2016), sarjana Indonesia juga berhasil menghasilkan 17 naskah hasil penelitian dari perspektif regional (Purwanto et al., 2023; Wahid et al., 2023).

Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak aspek dari periode revolusi yang belum dieksplorasi dan dijelaskan secara komprehensif, salah satunya adalah tentang kebutuhan logistik pertahanan pada saat perang dalam mempertahankan kemerdekaan. Perang antara Indonesia dengan Belanda pada tahun 1945-1949, secara militer dikategorikan sebagai perang asimetris. Ketimpangan kekuatan yang signifikan antara Belanda yang memiliki persenjataan modern dengan Indonesia yang hanya mengandalkan senjata tradisional dan senjata hasil rampasan, membuat pejuang republik membentuk strategi perang gerilya yang di satu sisi efektif dalam membingungkan dan menyulitkan Belanda. Namun, di sisi lain, hal ini memicu kekerasan terhadap penduduk sipil karena Belanda kesulitan membedakan siapa musuh yang sebenarnya. Di pihak Indonesia, perpecahan antar

kelompok milisi dan organisasi semi-militer memperparah situasi. Perbedaan ideologi dan aksi tanpa koordinasi dengan Tentara Nasional Indonesia yang pada saat itu jumlahnya masih terbatas, menciptakan lingkaran kekerasan yang berlapis. Peristiwa Karawang menjadi contoh nyata dari kompleksitas internal ini (Imadudin, [2018](#)) dan kekerasan juga terjadi terhadap rakyat selama perang di wilayah Sumatera Barat (Elvira, [2020](#)) serta sejumlah revolusi sosial lainnya.

Kedatangan pasukan Belanda yang berada di Indonesia secara keseluruhan berjumlah 220.000. Sebanyak 138.000 hingga 140.000 orang adalah pasukan dari Belanda dan 75.000 hingga 80.000 berasal dari tentara KNIL (Koninklijk Nederlandsh-Indisch Leger). Pasukan yang berasal dari Belanda terdiri dari 120.000 dari Koninklijke Landmacht (Angkatan Darat) dan 20.000 dari Koninklijke Marine (Angkatan Laut). Dari jumlah itu, 100.000 di antaranya merupakan tentara wajib militer yang dikirim di Indonesia, 30.000 sukarelawan perang dan 1000 pasukan profesional (Oostindie, [2016](#), pp. 8–9). Di pihak Republik Indonesia, kekuatan militernya berisi dua kekuatan utama, yaitu tentara dan laskar rakyat. Pada awalnya keduanya merupakan dua kelompok yang berbeda dan terkadang saling terpisah, bahkan berlawanan. Istilah laskar rakyat digunakan untuk menyebut tidak hanya satu badan perjuangan saja, namun berbagai kelompok yang beragam baik itu secara ideologi dan identitas.

Mengapa logistik pertahanan sangat diperlukan di dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia? Karena di dalam perang, salah satu aspek penting yang mendorong kedua belah pihak yang terlibat untuk saling mengalahkan adalah adanya sumber dana dan logistik yang harus memadai. Nazaruddin Zainun mengungkapkan bahwa Republik Indonesia yang baru saja merdeka mengalami banyak kesulitan dalam menyediakan logistik karena kondisi perekonomian yang sangat terpuruk (Zainun, [2019](#), pp. 1–2). Pemerintah Republik Indonesia dihadapkan pada situasi dilematik selama masa revolusi. Di satu sisi, kebutuhan nasional, seperti persenjataan dan perlengkapan kantor, meningkat pesat. Di sisi lain, kondisi ekonomi sedang mengalami kemerosotan. Menyadari kondisi tersebut, Pemerintah RI mengambil inisiatif untuk meningkatkan pendapatan negara dengan mengeksport komoditas hasil perkebunan ke luar negeri. Hasil penjualan komoditas ini kemudian digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan nasional selama revolusi berlangsung. Keadaan yang tidak kondusif tersebut diperparah dengan kebijakan blokade ekonomi Belanda yang di mulai sejak November 1945 sampai tahun-tahun berikutnya (Ningsih, [2023](#); Wulandari, [2022](#), p. 99). Blokade ini menghambat distribusi barang dan jasa, memperparah kondisi ekonomi Indonesia secara keseluruhan (Reid, [1996](#), pp. 218–219).

Blokade ini tujuannya untuk melemahkan daya tahan ekonomi dan logistik Republik Indonesia dengan memutus jalur suplai bahan makanan, menghentikan ekspor dan impor barang dan kebutuhan dasar serta perlengkapan senjata. Hal ini tentu memperburuk kondisi sosial dan ekonomi orang Indonesia. Blokade ekonomi ini juga dengan mudah dilakukan karena mayoritas kegiatan ekspor dan impor masih dikuasai oleh bekas pemerintah Hindia Belanda. Blokade ini tidak hanya dilakukan di perairan Indonesia, tetapi dilakukan di darat terutama di pusat-pusat ekonomi milik negara dan rakyat Indonesia (Boediono [2016](#), p. 2; Setiawan, Mahardika, and Rulita [2023](#), p. 2). Sejatinya kebijakan blokade ini merupakan strategi dan langkah politik yang tepat karena Belanda sepenuhnya mengetahui bahwa Indonesia saat itu mengalami kesulitan dan tentunya hal ini semakin melemahkan Indonesia dengan harapan agar Indonesia menyerahkan kembali kedaulatannya kepada Belanda (Setiawan, Mahardika, and Rulita, [2023](#), p. vi).

Menyadari situasi ekonomi yang sulit akibat blokade Belanda dan meningkatnya kebutuhan nasional selama masa revolusi, Sjafruddin Prawiranegara selaku Menteri Kemakmuran Indonesia saat itu mengambil langkah tegas melalui PP No.5 tahun 1948 perihal distribusi dan pengumpulan bahan pokok makanan (UUD RI, [1948b](#)), Peraturan Pemerintah nomor 15 tahun 1948 perihal menghitung ternak dengan pertimbangan untuk memajukan perekonomian (UUD RI, [1948c](#)), PP No.29 tahun 1948 yang bertujuan untuk memberantas penimbunan barang penting, seperti padi, gabah, beras, tepung, gula, jagung, minyak tanah, garam, kopi, teh, dan tapioka karena penimbunan barang penting dapat

mempersulit akses rakyat terhadap kebutuhan pokok dan memperparah krisis pangan yang sedang terjadi. Oleh karena itu, perlu dilakukan tindakan tegas untuk mencegah praktik ini. Hal ini dilakukan untuk menjamin kelancaran peredaran barang-barang tersebut di tengah situasi kekurangan (UUD RI, [1948a](#)). Kebijakan ini dibentuk dalam rangka mengelola dan mengarahkan perekonomian Republik Indonesia ke kondisi yang lebih baik.

Salah satu wilayah yang terkena dampak dalam menghadapi kebijakan blokade ekonomi ini adalah Sumatera Barat. Sumatera Barat memiliki sejarah panjang dalam melawan kekuatan asing, khususnya Belanda. Hampir satu abad sebelum masa kemerdekaan, rakyat Sumatera Barat telah menunjukkan perlawanan gigih terhadap kolonialisme Belanda di antaranya yang paling dikenal adalah perang Padri (Asnan, [2023a](#); Hati, [2018](#); Khusniawati et al., [2021](#)), Perang Manggopoh (Fatimah, [2022](#); Yuniarni, [2012](#)), dan perang Kamang (Fitri et al., [2022](#); Habibuna & Efrizal, [2022](#); Lionar et al., [2020](#)). Terutama saat memasuki periode revolusi, muncul berbagai kajian dari beberapa ahli sejarah di antaranya adalah buku yang ditulis oleh Audrey Kahin yang menulis tentang gerakan-gerakan revolusioner yang terjadi di Sumatera Barat (Kahin, [2005](#)). Studi hampir serupa juga dilakukan oleh Anderson tentang gerakan revolusioner yang terjadi khususnya di pulau Jawa (Anderson, [1972](#)). Sejarahwan lokal pun turut berkontribusi dalam penulisan sejarah periode revolusi ini seperti Mestika Zed menulis tentang kota Padang dan sekitarnya pada masa revolusi (Zed et al., [2002](#)) dan disertasinya tentang kepialangan politik dan revolusi di kota Palembang (Zed, [2003](#)). Ahmad Husein sebagai pelaku sejarah juga menulis dua jilid buku tentang perjuangan kemerdekaan di Minangkabau dan Riau (Husein et al., [1978a](#), [1978b](#)). Penulisan hal yang sama dengan *setting* Minangkabau juga dilakukan oleh Amura (Amura, [1979](#)). Gusti Asnan meneliti sejarah perjuangan rakyat di Kabupaten Solok (Asnan, [2003a](#)). Zusneli Zubir meneliti daerah Sumpur Kudus pada masa revolusi (Zubir & Rismadona, [2014](#)). Dan terakhir buku yang ditulis oleh Muhammad Iskandar tentang peran desa dalam memperjuangkan kemerdekaan di Sumatera Barat (Iskandar et al., [1998](#)).

Meskipun banyak penelitian telah dilakukan, sebagian besar kajian di atas hanya fokus pada perlawanan rakyat, aspek-aspek politik dan diplomasi serta tokoh-tokoh utama dalam perjuangan. Dalam pertempuran fisik yang terjadi, sebagian rakyat mempersenjatai diri dan masuk dalam badan-badan perjuangan. Senjata yang digunakan berupa bambu runcing, senjata api hasil rampasan. Rakyat berjuang di mana pun selain yang ikut berjuang di medan pertempuran, ada perjuangan rakyat lainnya yang juga membantu untuk mempertahankan kemerdekaan. Baik pria maupun wanita, tua maupun muda, terlibat dalam perjuangan yang kegiatannya mencakup pertahanan kampung, penjagaan keamanan, pengumpulan dana dan dapur umum. Semua kegiatan perjuangan tersebut sangat penting dan saling mendukung satu sama lain dalam mempertahankan kemerdekaan. Di tengah pertempuran rakyat dalam mempertahankan kemerdekaan, berbagai aktivitas penyelundupan marak terjadi. Singapura menjadi tujuan utama, di mana berbagai pihak terlibat mulai dari rakyat biasa, pemerintah di bawah naungan Indonesian Office (Indoff) (Alfatiana & Wulandari, [2023](#)) hingga etnis Tionghoa yang berpihak pada perjuangan kemerdekaan (Erniwati, [2011](#)).

Upaya diplomasi dan pertempuran fisik yang dilakukan bersamaan, tetap saja tidak lepas dari kebutuhan logistik perang yang memadai meliputi senjata, obat-obatan, makanan, dan tenaga kesehatan. Ironisnya, situasi ekonomi saat itu sedang terpuruk akibat blokade ekonomi Belanda. (Poesponegoro et al., [2010](#), pp. 273-274). Di tengah kondisi yang serba terbatas, pemerintah dan masyarakat Sumatera Barat harus mencari cara-cara inovatif untuk mencari dana guna mendukung kebutuhan logistik perang dan memastikan kelangsungan hidup dan perjuangan mereka dalam mempertahankan kemerdekaan. Berdasarkan hal di atas, artikel ini menawarkan perspektif baru dengan menggali lebih dalam mengenai upaya pemenuhan kebutuhan logistik selama masa revolusi di Sumatera Barat sebagai medan perang dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia yang telah diproklamirkan.

METODE

Penulisan artikel ini menggunakan metode sejarah sebagaimana lazimnya diterapkan oleh para sejarawan. Metode ini terdiri dari empat tahap utama yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi (Abdurahman, [1999](#), p. 54; Bakar, [2021](#), p. 2; Gottschalk, [2008](#), p. 39) dengan pendekatan yang didukung dengan studi kepustakaan. Untuk data sumber primer dan sekunder didapatkan melalui turun langsung ke lapangan. Sumber primer yang digunakan dalam melakukan penulisan ini yaitu berupa arsip yang diakses secara *online* dan laporan Kementerian Penerangan “Provinsi Sumatera Tengah 1953”, lalu buku PDRI dalam khazanah kearsipan serta dua jilid buku Ahmad Husein sebagai pelaku sejarah dengan judul sejarah perjuangan kemerdekaan di Minangkabau/Riau 1945-1950 Jilid I dan Jilid II dan buku karangan Amura yang berjudul Sejarah Revolusi Kemerdekaan di Minangkabau 1945-1950 yang juga sebagai pelaku sejarah langsung kemudian dokumen resmi pemerintah seperti Peraturan Dewan Pertahanan daerah Sumatera Barat dan Laporan BPK RI tentang Peraturan Pemerintah pada tahun 1948.

Studi pustaka terkait sumber sekunder juga dilakukan di Kantor Arsip dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat, Kantor Arsip Kota Padang, Kantor Arsip Kota Bukittinggi, Perpustakaan FIB Universitas Andalas, Pustaka Pusat Universitas Andalas, Perpustakaan FIS Universitas Negeri Padang, Perpustakaan Provinsi daerah Sumatera Barat, Perpustakaan Proklamator Bung Hatta Bukittinggi yang berkaitan dengan tema penelitian tentang periode revolusi kemerdekaan. Pada tahap kritik sumber, penulis melakukan seleksi terhadap berbagai sumber yang telah dikumpulkan. Penulis memilih, menyaring, dan menentukan sumber untuk digunakan sebagai acuan penelitian. Setelah itu, data, konsep dan fakta yang diperoleh dari sumber-sumber tersebut dievaluasi dan divalidasi. Ini dilakukan untuk mendapatkan bukti sejarah yang kuat dan dapat dipercaya untuk menjelaskan dan memahami masalah yang akan diteliti. Selanjutnya, informasi dikumpulkan secara kronologis untuk menghasilkan generalisasi atau kesimpulan berupa pemahaman sejarah tentang apa yang ingin ditulis. Pada tahap historiografi, di mana penulis menggunakan data yang telah dikumpulkan untuk merekonstruksi peristiwa masa lalu. Sederhananya, langkah ini adalah penulisan sejarah secara sistematis, logis, dan kronologis, disertai dengan penjelasan fakta dan data yang ditemukan sebagai hasil interpretasi. Hal ini menghasilkan penulisan sejarah yang analitis dan berlandaskan bukti, sehingga menghasilkan karya sejarah yang ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sumatera Barat dari Kekalahan Jepang, Berita Proklamasi, hingga Pembentukan Badan Perjuangan

Menjelang akhir pendudukan Jepang yang dilanda krisis ekonomi dan penderitaan yang kian mendalam akibat keterlibatan Jepang dalam Perang Asia Timur. Situasi ini menjadi indikasi kuat akan kekalahan Jepang. Namun, informasi tersebut belum diketahui oleh rakyat karena minimnya akses komunikasi (Husein et al., [1978a](#), p. 78). Kabar tentang kekalahan Jepang pada tanggal 15 Agustus 1945 masih simpang siur di kalangan masyarakat kota. Hanya segelintir pemimpin yang mengetahui kebenaran tersebut.

Pada saat yang sama tanggal 15 Agustus 1945, pemancar radio *Sumatora Cuo Hosu Kyoku* menghentikan siarannya. Begitu juga pemancar-pemancar radio lokal seperti yang ada di Padang, Jambi dan Pekanbaru. Surat kabar *Padang Nippo* pada hari itu tidak terbit. Masyarakat Sumatera Barat dalam suasana kebingungan karena tidak mengerti dengan apa yang terjadi. Sumber komunikasi pada saat itu hanya sebatas bisikan-bisikan dan desas-desus atau dalam bahasa rakyat disebut “*radio luitik*” (Amura, [1979](#), p. 24). Seorang pejabat Kejaksaan Jepang memberi tahu Mr. St. Moh. Rasyid tentang aksi penyerahan itu pada tanggal 16 Agustus 1945, kemudian memberi tahu beberapa rekannya. Orang-orang yang mendengar berita itu percaya bahwa Republik Indonesia akan mendapatkan

kemerdekaan dalam waktu yang dekat. Proklamasi kemerdekaan yang dikumandangkan di Jakarta tidak secara keseluruhan dapat diterima oleh tiap-tiap daerah termasuk di Sumatera Barat.

„Kemenangan terachir pasti berada dipihak kita”.
Pada tanggal 15 Agustus 1945, tiba-tiba Pemantjar Radio Sumatera (Sumatera Hosokyoku) di Bukittinggi diam tak bersuara selama beberapa hari. Radio umum disetiap liku ibu kota Sumatera ini djuga sepi dan dari orang-orang Djepang, dan tenteranja jang beribu-ribu banjaknja di Bukittinggi, kelihatan kegelisahan jang luar biasa, dimana mereka mengobrali barang-barangnja, memulangkan sekalian pekerdja, dan djuga melutjuti sendjata-sendjata Gyu Gun jang berasrama disekitar kota Bukittinggi di Gulai Bantjah, Belakang Blok, Pabidikan dan Sarik dan dikota-kota Padang, Painan, dan lain-lain kemudian memulangkan semua Gyu Gun jang telah dilutjuti sendjatanja itu, dengan hanja sepasang pakaian seragam jang lekat dibadan.
Barulah pada tanggal 21 Agustus 1945 Pemantjar Radio bersuara lagi, menjatakan bahwa : „Tenno Heika telah memerintahkan supaja perang dihentikan dan kabinet Djepang jang lama bubar, serta dibentuk kabinet baru oleh Pangeran Higashi Kuni no Mya Naruhiko O Denka”.

Gambar 1. Berita Kekalahan Jepang

Sumber: Kementerian Penerangan, 1953, p. 83)

Pada tanggal 18 Agustus 1945, diadakan pertemuan rahasia oleh sejumlah pemuda kota Padang untuk meyakinkan diri tentang kebenaran proklamasi tersebut yang kemudian membentuk organisasi Badan Penerangan Pemuda Indonesia (BPPI) di bawah pimpinan Ismail Lengah. BPPI inilah yang menyebarkan luaskan berita proklamasi kemerdekaan dengan mencetak teks proklamasi kemerdekaan untuk disebarluaskan di seluruh pelosok kota maupun desa di Sumatera Barat dan menjadi sumber informasi terpercaya bagi masyarakat (Ajisman, Zubir, Jumhari, & Efrianto A., 2012, p. 117). Hal yang sama juga dilakukan oleh pemuda di kota Bukittinggi. Mereka juga mengadakan suatu pertemuan hingga mendirikan suatu organisasi pemuda bernama Pemuda Indonesia (PI) yang menjadi cikal bakal Pemuda Republik Indonesia (PRI). PRI inilah yang menjadi pionir lahirnya PRI lain di nagari-nagari yang bertujuan untuk menjamin keamanan daerah masing-masing dalam rangka mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang baru saja diproklamasikan (Iskandar et al., 1998, p. 37).

Meskipun wadah perjuangan bagi pemuda Sumatera Barat baru dalam bentuk BPPI dan PRI, namun tugas dan tanggung jawab yang dihadapi cukup berat. Pertama, merebut kekuasaan dan senjata dari Jepang yang masih berkeliaran di kota-kota. Kedua menghadapi tentara sekutu yang akan mendarat di Sumatera Barat melalui informasi dari pemerintahan pusat. Sebagai lanjutan dari rapat-rapat sebelumnya, para pemimpin di Sumatera Barat tanggal 31 Agustus 1945 mengadakan rapat untuk membentuk Komite Nasional Indonesia (KNI) Sumatera Barat yang dipimpin oleh Muhammad Sjafe'i sesuai dengan Dekrit Presiden RI tentang pembentukan Barisan Keamanan Rakyat (BKR). Setelah terbentuknya KNI Sumatera Barat, pada pertengahan September 1945 para pemuda mendesak agar segera dilakukan pemindahan kekuasaan dari Jepang untuk tujuan adanya Kepala Pemerintahan bangsa Indonesia dan mengangkat Muhammad Sjafe'i sebagai Residen/Kepada daerah Sumatera Barat (Amura, 1979, p. 32).

Sumatera Barat dalam Medan Perang

Kehadiran Sekutu, Agresi Militer Belanda hingga PDRI

Menjelang kedatangan sekutu pada Oktober 1945, para pemimpin Republik di Sumatera Barat telah berhasil meletakkan fondasi pemerintahannya di daerah. Hal ini antara lain tampak dari upaya mereka menegakkan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dengan mencetak, menyebarkan teks proklamasi, penaikan bendera merah putih dan pengambilalihan lembaga-

lembaga pemerintah warisan Jepang dan menggantinya dengan lembaga baru seperti BKR, KNI. Namun peran sentral BPPI juga tidak bisa dinafikan. Sesungguhnya bahwa fase awal perjuangan proklamasi amat ditentukan oleh peran sentral yang dimainkan pemuda BPPI dalam mendobrak dan sekaligus menggugah keterlibatan para pemimpin dan massa rakyat ke dalam kancah revolusi.



Gambar 2. Kapal Inggris memasuki Teluk Bayur (Emmahaven).

Di sebelah kanan terlihat kapal Inggris HMS Whitesand Bay (K633), sebuah kapal pertahanan Inggris

Sumber: Nationaal Archief. NL-HaNA_2.24.04.03 inventaris number [10434](#)

Pasukan sekutu yang dikirimkan ke Sumatera Barat tergabung dalam Divisi India ke-26 di bawah Mayor Jendral H.M. Chambers. Jendral Inggris itu ditugaskan untuk mendaratkan pasukannya di tiga kota utama yaitu Medan, Padang dan Palembang. Gelombang pertama di Sumatera Barat terdiri dari 6000 pasukan infanteri dan angkatan laut serta 650 kendaraan mendarat di Teluk Bayur (Kementerian Penerangan, [1953](#), p. 94; Zed et al., [2002](#), p. 104). Sejak awal kehadirannya, sekutu berkomitmen untuk tidak mengganggu urusan Republik Indonesia dan pihak Indonesia juga memahami posisi Inggris, karena itu mereka dapat melanjutkan dan tidak menghalangi tugas mereka. Karena itu, tugas rekapitulasi pasukan Jepang berjalan lancar. Pada 21 Oktober 1945 di kota Padang, Komandan Tentara ke-25 Jepang, Mayor Jenderal Motitake Tanabe dan wakilnya Laksamana Sueto Hirose, menandatangani secara resmi penyerahan semua pasukan Jepang di Sumatera (Iskandar et al., [1998](#), p. 72).

Namun, kecurigaan mulai terlihat ketika pasukan sekutu diikuti oleh perwira-perwira Belanda dengan berkedok RAPWI (Recovery of Allied Prisoners of War and Internees) (Amura, [1979](#), p. 44), di dalam tumpukan barang-barang bawaan sekutu juga terdapat paket-paket yang berlabel NICA yang di dalamnya berisi senjata-senjata dan amunisi (Zed et al., [2002](#), p. 108). Pasukan NICA yang didukung oleh sekutu bersikap angkuh dan sewenang-wenang meminta dan menduduki gedung yang dulunya merupakan kantor mereka. Akibatnya, suasana politik di Sumatera Barat menjadi panas dan mengakibatkan munculnya insiden. Hal ini terjadi setelah orang-orang NICA menurunkan bendera Merah Putih yang membuat kelompok pemuda tersinggung dan menimbulkan amarah (Iskandar et al., [1998](#), p. 73; Nasution, [1977](#), p. 421).



Gambar 3. Poster Semangat Perjuangan oleh pemuda di Bukittinggi
 Sumber: Nationaal Archief. NL-HaNA 2.24.04.01 inventaris number [4288](#)

Insiden kecil tersebut membuat pemuda-pemuda mengobarkan semangat perjuangan mereka dengan mempergunakan poster-poster yang berisi menentang penjajahan dalam berbagai bentuk yang membuat pihak sekutu tersinggung sehingga banyak pemuda yang ditangkap, ditawan dan disiksa serta puluhan rumah dibakar (Kementerian Penerangan, [1953](#), p. 97). Sekutu menyerbu setiap tempat yang di anggap markas kegiatan pemuda. Gedung BPPI di pasar gadang digerebek dan beberapa orang pemuda di tangkap dan disiksa di kamp sekutu. Insiden tersebut pada gilirannya memicu aksi pembalasan dari pemuda yang menggiring massa kepada gerakan demonstrasi dan tindakan protes dimana-mana, yang pada gilirannya membakar semangat juang pembela Republik ke tindakan yang lebih jauh dengan aksi kekerasan (Zed et al., [2002](#), p. 122). Situasi menjadi lebih buruk pada awal Desember 1945 ketika pasukan sekutu dengan cepat mengambil alih kota Padang, termasuk Sekolah Teknik yang berada di Simpang Haru. Guru-guru protes atas pengambilalihan tersebut, termasuk Said Rasad yang kemudian menjadi Wakil Walikota Padang, ditangkap dan dipukul oleh sekutu. Sebagai tanggapan, kelompok pemuda melakukan serangan tak terduga terhadap konvoi pasukan Inggris. Situasi yang tidak berhenti memburuk menyebabkan kematian dua marinir dan pembunuhan anggota Palang Merah Sekutu, Mayor Anderson dan Nona Allingham (Iskandar et al., [1998](#), p. 73).

Konflik antara pihak Indonesia dan sekutu mencapai puncaknya ketika pasukan Inggris secara paksa menahan tiga pejabat Keresidenan, yakni Mr. Sutan Mohammad Rasjid (Ketua Residen), Mr. Haroen Al Rasjid (Kepala Pengadilan Keresidenan) dan Johny Anwar (Kepala Kepolisian Kota Padang). Penahanan ini dilakukan untuk menangkap seorang warga Indonesia yang diduga menjadi mata-mata Belanda dan meminta agar warga yang menjadi mata-mata tersebut harus diperiksa di kota Padang. Namun, permintaan ini ditolak oleh pihak Republik yang kemudian memicu penculikan tiga pejabat Republik tersebut. Masalah ini berhasil diselesaikan pada saat Mohammad Djamil dilantik sebagai Gubernur Muda Sumatera Tengah. Mata-mata tersebut akhirnya dibebaskan dan Inggris pun melepaskan ketiga pejabat Republik yang ditahan. Meski begitu, konflik antara Republik dan Inggris terus berlanjut hingga masa tugas Inggris sebagai kekuatan Sekutu di Sumatera berakhir.

Pada tanggal 28 November 1946, pasukan sekutu secara resmi menyerahkan kekuasaannya kepada Belanda. Dalam serah terima itu, Belanda diwakili oleh Letkol. J.W. Sluyter, komandan U Brigade. Dengan mundurnya sekutu dari Sumatera Barat, Belanda lebih banyak mempunyai ruang gerak dan menggunakan kesempatan itu untuk melakukan kekerasan, pembunuhan masal serta aksi-aksi penjarahan dan bumi hangus di kampung-kampung.

Pada tanggal 31 Desember 1946, pihak Belanda melakukan serangan udara ke beberapa desa di sekitar kota Padang. Desa-desa ini sebenarnya jauh di luar garis demarkasi seperti Bandar Buat, Pasar Usang dan Lubuk Begalung adalah beberapa desa yang terkena dampak dari serangan ini. Serangan inilah yang menjadi penyebab utama terjadinya pertempuran antara orang Belanda dan orang Sumatera Barat sejak awal tahun 1947. Persenjataan modern Belanda seperti mortir Howitzer, panser dan pesawat udara mustang berhasil menghancurkan kekuatan Republik. Sedangkan senjata yang pakai oleh pasukan Republik hanyalah sisa-sisa senjata hasil rampasan dari Jepang dan beberapa senjata buatan sendiri seperti bambu runcing, bom dan senapan *balansa*. Tetapi rakyat Sumatera Barat masih memiliki semangat juang yang luar biasa.

Sebagai langkah terakhir, Republik Indonesia menggunakan taktik bumi hangus untuk mencegah gedung dan fasilitas lainnya jatuh ke tangan Belanda. Selain itu, Belanda juga melakukan serangan dan penembakan terhadap warga sipil yang tidak bersalah. Misalnya, mereka menembak orang di Pasar Tabing, Lubuk Buaya, Duku, dan Pasar Usang. Selain itu, Belanda menembaki kereta api yang membawa pengungsi keluar kota yang mengakibatkan banyaknya korban. Perundingan di tingkat pusat terus berganti-ganti sementara pertempuran terus berlanjut (Amura, [1979](#), p. 79). Perundingan-perundingan yang dilakukan Belanda dengan pihak Republik ternyata hanyalah taktik mereka semata untuk memperkuat kedudukannya. Bahkan sebaliknya perundingan tersebut justru memperlemah posisi Indonesia. Dalam dua kali perundingan yang dilakukan dengan pihak Republik sejak tahun 1946, Belanda selalu ingkar janji sehingga berakhir dengan dua kali agresi. Perundingan pertama yaitu Linggarjati berakhir dengan agresi pertama, dan perundingan kedua yaitu Renville diakhiri dengan agresi militer yang kedua.

Perjanjian Renville yang disepakati pada tanggal 17 Januari 1948 ternyata tidak banyak membantu untuk menyelesaikan konflik berkepanjangan antara kedua belah pihak yang sama-sama tetap berpegang teguh pada prinsip dan keyakinan masing-masing. Akibatnya hubungan Republik dengan pihak Belanda semakin hari semakin memburuk. Hari minggu tanggal 19 Desember 1948, Wakil Mahkota Belanda, Dr. H.V.K. Beel mengeluarkan pernyataan melalui radio *Batavia* bahwa pemerintah kerajaan tidak terikat lagi dengan Perjanjian Renville. Bersamaan dengan itu, Belanda melancarkan serangan brutal terhadap ibukota Republik waktu itu, Yogyakarta (Ricklefs, [2008](#), p. 347). Di Sumatera Barat, sasaran utama Belanda dalam agresi kedua adalah untuk menduduki pusat pemerintahan sipil dan militer Republik, khususnya di Padang Panjang dan Bukittinggi. Di daerah Padang Panjang, pasukan Belanda yang bergerak dari Padang menuju arah utara yang bergabung dengan pasukan yang diturunkan di Singkarang untuk selanjutnya masuk ke Bukittinggi yang akhirnya jatuh pada tanggal 21 Desember 1948. Setelah kejatuhan Yogyakarta dan Bukittinggi, para pemimpin yang ada di Sumatera Barat segera mengambil alternatif dengan membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) di bawah Menteri Sjafruddin Prawiranegara. Sejak saat itulah panggung sejarah perjuangan berpindah dari kota ke pedalaman hutan-hutan guna menjalankan roda pemerintahan.

Sumber Dana Perang dan Logistik Pertahanan

Revolusi Kemerdekaan di Indonesia adalah urusan yang mahal. Suasana perang tidak hanya disertai dengan kehancuran yang besar-besaran dalam kehidupan dan harta benda, tetapi juga ada kebutuhan logistik untuk memerangi revolusi yang berlarut-larut, menempatkan tuntutan keuangan yang sangat besar pada Republik Indonesia (Robert, [1988](#)). Selain itu, Republik Indonesia masih merupakan negara baru dengan sumber daya keuangan yang tidak stabil pada awal kemerdekaannya.



Gambar 4. Kelompok pemuda yang bersenjatakan bambu runcing, siap menerima perintah di kota Bukittinggi, akhir tahun 1945

Sumber: Husein, 1978, p. 143

Para pemuda hampir tidak memiliki senjata, kecuali hanya beberapa orang anggota BKR yang memperolehnya dari pihak Jepang. Pada mulanya senjata mereka hanyalah batu kemudian diganti dengan bambu runcing dan pada saat yang sama diusahakan mendapatkan senjata api dengan cara merampas dari Jepang atau mencurinya dari sekutu. Seperti yang terjadi di Ulu Gaduik yang dekat dengan pabrik semen Indarung, kota Padang. Pada tanggal 3 November sekelompok pemuda berhasil mencuri tempat penyimpanan senjata yang dikawal sekutu (Zed et al., [2002](#), p. 185). Pada periode awal revolusi di Sumatera Barat, badan-badan perjuangan rakyat terbentuk untuk menampung keinginan masyarakat yang ingin berpartisipasi dalam perjuangan. Hal inilah yang membuat perjuangan rakyat di Sumatera Barat menjadi lebih terstruktur dan terorganisir dengan baik, karena mereka tergabung dalam satuan-satuan komando yang jelas. Pembentukan badan-badan ini tentunya membutuhkan dana yang cukup besar. Berbagai upaya dilakukan baik oleh masyarakat yang tidak bergabung dalam badan-badan perjuangan tersebut maupun oleh masing-masing badan itu sendiri untuk mengumpulkan dana guna membiayai perjuangan mereka.

Strategi Pemenuhan Logistik di Sumatera Barat

Strategi pemerintah dalam mendapatkan persenjataan sebagai logistik terpenting telah dijalankan sejak masa awal revolusi, yaitu dengan merebut dan menyita senjata serta amunisi Jepang. Menurut (Bing Siong, [2001](#), p. 822), langkah tersebut merupakan cara dan strategi yang digunakan oleh pemuda dan pejuang Indonesia dalam mendapatkan senjata. Oleh karena itu, sebagai upaya untuk mendapatkan senjata, pemuda dan pejuang di Sumatera Barat mulai menyerbu gudang-gudang senjata Jepang pada bulan Oktober 1945.

Painan menjadi saksi bisu pertempuran sengit antara para pemuda dan pasukan Jepang. Kegigihan para pemuda dalam merebut gedung dan persenjataan Jepang dibayar mahal dengan jatuhnya korban jiwa. Ketidakseimbangan kekuatan dan pengalaman menjadi faktor utama kekalahan para pemuda. Meskipun kalah, gedung-gedung perkantoran dan rumah-rumah bekas tempat tinggal Jepang berhasil direbut dan diserahkan kepada KNID yang saat itu menjalankan pemerintahan di Sumatera Barat. Barang-barang rampasan inilah menjadi modal utama dalam perjuangan menegakkan kemerdekaan Indonesia di Sumatera Barat (Iskandar et al., [1998](#), p. 39).

Pada permulaan Oktober 1945 beberapa perwira bekas Gyu Gun di bawah pimpinan Sjarif Usman merencanakan untuk mengadakan serangan di Payakumbuh untuk merebut senjata dengan kekerasan. Namun usaha tersebut dibatalkan disebabkan rahasia dari rencana penyerbuan tersebut telah diketahui oleh pihak Jepang. Upaya berunding pun dilakukan untuk mendapatkan senjata di bawah pimpinan Makinuddin bersama rekan pemuda lainnya dan dibantu oleh Darwis Tarim, usaha berdiplomasi dengan pihak Jepang akhirnya berhasil. Sebagai hasil berdiplomasi dengan pihak

Jepang, kelompok pemuda tidak hanya mendapatkan senjata dengan jumlah yang banyak tetapi juga gudang senjata bawah tanah milik Jepang di Kubu Gadang. Gudang senjata ini telah dihancurkan oleh sekutu, tetapi semua kerusakan dapat diperbaiki oleh 1500 pemuda (TKR) yang di pimpin oleh Muchtar Kemal (Husein et al., [1978b](#), p. 201).

KEMBALI KEPADA PEMUDA PELOPOR.

Api jang dikobarkan oleh para Pemuda Pelopor ini menjala dengan sangat hebatnja, karena memang sesuai dengan semangat heroisme. Disetiap kota, terutama Padang dan Bukittinggi jang diduduki Sekutu, timbullah kemauan bertindak jang sangat bergelora. Dinding-dinding rumah jang dipinggir djalan diukiri dengan sembojan-sembojan jang garang dan galak bunjinja dalam pelbagai bahasa seperti :

Tekad kita „MERDEKA ATAU MATI!“
Down with Imperialism !
Away with Colonialism !
Indonesia for Indonesian !

Mereka mengandjurkan perampasan sendjata dari Djepang agar pedjuang dapat mempersendjatai diri, dan perampasan ini harus dilakukan dengan segala tjara jang mungkin. Maka terdjadilah insiden-insiden dimana-mana. Insiden-insiden ini bukan sadja terdjadi dengan Djepang, tetapi djuga dengan pihak Sekutu utamanja di Padang, dan makin lama perampasan sendjata ini makin merata dan terdjadi dalam ukuran jang lebih besar dengan setjara tersusun.

Gambar 5. Perintah Perampasan Senjata

Sumber: Kementrian Penerangan, [1953](#), p. 98.

Pada tanggal 3 November 1945 kelompok pemuda kota Padang mengetahui bahwa Jepang menyembunyikan senjata serta amunisinya di Kampung Ulu Gaduik. Pada waktu itu kamp penyimpanan senjata tersebut dikawal Sekutu. Namun berkat usaha pemuda yang terlatih dalam pengalaman militer di zaman Jepang, mereka berhasil mencurinya. Sebanyak empat buah senjata mesin ringan didapatkan, ditambah tiga puluh buah karabin dan beberapa puluh granat tangan dan beberapa peti peluru (Zed et al., [2002](#), p. 185).

Penyelundupan Emas Hitam (Opium)

Upaya lain untuk mendapatkan senjata adalah dengan menyelundupkan opium yang kemudian dijual untuk membiayai berbagai kebutuhan selama revolusi. Perdagangan candu atau yang dikenal juga sebagai emas hitam ini, menghasilkan pendapatan yang cukup signifikan (Kahin, [2005](#), p. 231) sehingga dijadikan sebagai sumber penting pendapatan dan untuk sementara waktu sebagai sumber utama devisa (Robert, [1988](#)). Pengelolaan perdagangan candu dan penyediaan perbekalan perang dikoordinasikan oleh bagian perbekalan Divisi IX yang dipimpin oleh Ismael Lengah.

Sebelum agresi militer Belanda kedua, sejumlah besar opium telah diangkut dengan kapal perang dari Yogyakarta menuju Bukittinggi kemudian disimpan di Gedung Tamu Agung. Tanggung jawab penyimpanan opium ini berada di bawah Mr. Loekman Hakim sebagai wakil Kementerian Keuangan RI dan Mr. A. Karim dari Bank Negara Indonesia pada awal Desember 1948. Opium tersebut telah dibawa ke Pekanbaru. Namun ketika Belanda memulai agresinya yang kedua, pemindahan opium ini menjadi persoalan sebab menemui berbagai kesulitan terutama mengenai pengangkutannya. Mr. A Karim mengadakan dialog dengan Letnan II Basri Haznam, Kepala Seksi Kepolisian Militer Sumatera Tengah untuk mendapatkan kendaraan yang akan mengangkut opium ke wilayah Utara. Mr. A. Karim dalam dialognya menjelaskan mengenai sulitnya mendapatkan alat pengangkutan apa yang dikatakannya sebagai *de laatste schat* (harta penghabisan) dari Republik Indonesia ke daerah pedalaman. Pada malam hari tanggal 20 Desember 1948, setengah dari jumlah opium yang ada berhasil diangkat dengan truk yang berhasil ditemukan oleh Polisi Militer atas

perintah Basri Haznam ke Utara, ke Lubuk Sikaping di bawah pertanggungjawaban Syamsu Anwar, Pemimpin Bank Negara Cabang Bukittinggi dikawal oleh dua orang Polisi Militer. Jumlah Opium yang tersisa kemudian dibawa oleh satu truk lagi ke Halaban di Selatan Payakumbuh dengan pengawalan dua Polisi Militer dan sampai ke tujuannya dengan selamat sehingga besar kegunaannya dalam membantu biaya keperluan perjuangan menghadapi Belanda (Husein et al., [1978b](#), p. 49).

Penyelundupan opium juga terjadi di kota Padang yang berhasil dilakukan oleh komunitas Tionghoa yang bekerja sama dengan pejuang Republik di bawah tanggung jawab gerilyawan Tionghoa, Sho Boen Sheng yang menjabat sebagai ketua Poh An Tui pada waktu itu, menerima kiriman opium dari luar kota Padang. Opium tersebut kemudian dijual di Padang dan hasilnya kemudian dibelikan senjata dan kebutuhan lainnya. Semua peralatan dan kebutuhan perjuangan lainnya itu lalu dikirim dengan cara diselundupkan kepada Abdul Halim, pejuang Republik Indonesia yang berada di pedalaman (Wahid et al., [2023](#), p. 453). Selain itu, Bung Hatta juga memberikan bantuan satu ton opium untuk biaya perjuangan di daerah Riau (Suwondo, [1979](#), p. 94).

Menciptakan Jaringan Pertahanan

Seluruh rakyat Sumatera Barat menentang agresi militer Belanda I ini. Bahkan Alim Ulama menyatakan bahwa perang ini adalah perang sabil karena bertujuan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 30 Juli 1947 dibentuklah sebuah Front Pertahanan Nasional yang dipimpin langsung oleh Buya Hamka. Untuk mengorganisasikan kekuatan, badan ini saling berkoordinasi dengan Dewan Pertahanan Daerah (DPD). Perlawanan tidak hanya dilakukan oleh pasukan yang berada di medan perang secara langsung. Peran perempuan dengan dapur-dapur umumnya juga ikut andil dalam perjuangan serta masyarakat yang tidak dapat bekerja di garis depan juga membantu pasukan dengan menyediakan kebutuhan para pejuang. Dalam kutipan berikut terlihat semangat juang rakyat Sumatera Barat:

“Hari ini, tanggal 27 Juli 1947, di depan hadirin yang memenuhi gedung bioskop, Rasjid dan Ismail Lengah membentangkan suka duka para prajurit di Front yang memprihatinkan, apalagi sesudah agresi baru saja berlalu, serta terbunuhnya dengan secara kejam Wali Kota Padang. Kedua pemimpin menguraikan dengan sungguh keperluan-keperluan prajurit yang semakin meningkat dan makin mendesak. Apalagi dengan kian luasnya front pertempuran. Mereka hampir serentak menyerahkan dan mendaftarkan sumbangan, kaum ibu tanpa berpikir lagi melepaskan gelang, subang, liontin, bahkan pun cincin kawin, karena itulah yang terbawa pada ketika itu. Hampir dua bulan kemudian pada 27 September 1947, atas penunjukan Wakil Presiden Hatta, telah berdiri pula Panitia Pusat Pengumpulan Emas. Panitia ini bertujuan untuk mengumpulkan sumbangan-sumbangan Emas dari masyarakat bagi pembelian sebuah pesawat terbang dari luar negeri. Para cerdik pandai, alim ulama dan ninik mamak tidak ketinggalan ikut membantu. Akhirnya sebuah pesawat terbang telah dapat diperoleh dengan secara patungan itu. Emas bekas sumbangan itu masih tersisa sebanyak 2,5 kilo-gram dan dititipkan pada Bank Negara, yang sesudah penyerahan kedaulatan diserahkan seterusnya pada Bank Indonesia di Jakarta.” (Iskandar et al., [1998](#), p. 109).

TNI berjuang bersama staf pemerintah lokal dan kelompok pemuda Badan Pengawal Nagari dan Kota (BPNK). Meskipun dalam keadaan sulit, orang-orang yang mengungsi atau tinggal di daerah pendudukan selalu siap memberikan apa yang mereka miliki untuk mendukung perjuangan. Banyak produk pertanian dan pertambangan yang dihasilkan di daerah pedalaman digunakan untuk membeli kebutuhan militer, terutama amunisi dan persenjataan. Di lokasi yang dulunya merupakan markas militer Jepang daerah Sawahlunto dan Indarung, Republik mendirikan pabrik senjata yang kemudian pindah ke Solok dan Payakumbuh. Dan untuk kebutuhan sandang pangan para pejuang juga berasal dari hasil komoditas produk dari desa.



Gambar 6. Badan Pengawal Nagari dan Kota

Sumber: Kementrian Penerangan, 1953

Sumber Kekuatan di Balik Layar Peperangan

Bersamaan dengan serangan-serangan dan aksi-aksi pencegahan terhadap kedudukan musuh digaris depan, kelompok-kelompok di balik layar peperangan juga mengikuti perkembangan yang sedang berlangsung dalam suasana perang. Desa Sungai Puar yang letaknya tidak jauh dari gunung Merapi, penduduknya dikenal sebagai petani, pedagang dan pandai besi. Selama perang, pandai besi inilah yang membuatkan senjata untuk para pejuang Republik serta mengolah bom warisan Jepang untuk dijadikan ranjau darat. Selain itu, kaum ibu di desa ini juga turut berkontribusi dengan mengelola perbekalan dan dapur umum.

Badan Pembantu Barisan Muda (BPBM) yang dipimpin oleh Ibu Khasyiah sebagai Ketua, Nursyam sebagai Sekretaris dan Asma sebagai Bendahara, menginisiasi kegiatan di garis belakang ini. Mereka didukung oleh staf-staf di setiap jorong, termasuk Nurmana, Aminah, Bastiar, Nurani, Rahimah, Jarana, Hasna, Azizah, Sarni dan Kalisyah. Saat Agresi Militer Belanda kedua, nagari Sungai Puar ini berfungsi sebagai basis gerilya dan menjadi target serangan Belanda usai kota Bukittinggi dibom pada tanggal 19 Desember 1948. Selain warga asli Sungai Puar, banyak juga pengungsi yang berasal dari kota-kota lain wilayah Sumatera Barat (Iskandar et al., [1998](#)).



Gambar 7. Dukungan kaum wanita menyediakan perbekalan untuk para pejuang

Sumber: Kementrian Penerangan, 1953

Di kota Padang, dapur pertama pada masa awal Revolusi bertempat di rumah Ratnasari yang dijadikan sebagai kantor BPPI (kantor DHC 45 sekarang) bukan hanya dijadikan sebagai tempat

menyediakan makanan bagi para pejuang, melainkan juga tempat menghimpun obat-obatan yang dibutuhkan para pejuang. Untuk memenuhi kebutuhan perjuangan, selain menghimpun sumbangan dari masyarakat, para pemuda juga merampas gudang-gudang dan toko milik musuh Republik. Selain itu, pemuda juga merampas gudang-gudang beras milik Jepang di Teluk Bayur, Muaro, Purus, Rawang dan Olo (Zed et al., 2002, p. 232). Secara garis besar, dapur umum di kota Padang dan daerah lainnya pada masa revolusi dapat dibedakan dalam dua kategori. Pertama, dapur umum yang dibangun secara khusus di lokasi tertentu untuk memenuhi kebutuhan konsumsi para pejuang. Dapur umum tipe ini dikelola oleh beberapa orang perempuan pejuang, baik berasal dari penduduk asli maupun atas nama organisasi seperti Sabil Muslimat, Lasykar Muslimat. Kedua, dapur umum yang tersebar di setiap rumah tangga penduduk yang dikoordinir oleh aparat pemerintahan Nagari setempat. Melalui dapur umum tipe ini, para pejuang atau utusan telah ditentukan untuk mengumpulkan makanan untuk para pejuang dari rumah ke rumah agar kemudian dibawa ke markas pejuang untuk dibagi-bagikan kepada para anggotanya.

SIMPULAN

Kebhasilan atau kegagalan dalam perang sangat ditentukan oleh kemampuan para pihak yang terlibat dalam mengelola dan memenuhi kebutuhan logistiknya. Demikianlah, tentara Belanda dan Pemerintah Republik Indonesia selama perang kemerdekaan memiliki strategi masing-masing untuk memastikan suplai logistik dan sumber dana berjalan mulus dan berkelanjutan. Menghadapi keterbatasan yang dimilikinya, Pemerintah RI yang baru merdeka berusaha mendapatkan logistik dengan cara merebut dan merampas dari pihak lain. Setelah merdeka, para pemuda Indonesia merebut dan merampas senjata dari gudang-gudang senjata milik Jepang di berbagai wilayah Sumatera Barat. Khawatir akan beredarnya senjata di tangan pejuang Republik, Belanda menerapkan blokade ekonomi untuk menghalangi pihak Republik mendapatkan senjata dan barang-barang penting lainnya. Blokade ekonomi juga menghalangi upaya Republik mendapatkan dana untuk membiayai perjuangan. Sebagai akibatnya, pejuang Sumatera Barat terlibat dalam aksi-aksi pencurian, penjarahan dan perampokan yang disertai tindakan kekerasan dan bahkan menimbulkan korban jiwa baik pada penduduk sipil maupun tentara. Selain itu, penelitian ini juga menegaskan pentingnya dukungan dari masyarakat sipil dalam mendukung perjuangan kemerdekaan. Semangat gotong royong dan solidaritas yang kuat antara pejuang dan masyarakat lokal seperti peranan desa-desa, peranan perempuan dalam dapur umumnya juga memainkan peran penting dalam mempertahankan kemerdekaan.

REFERENSI

- Abdurahman, D. (1999). *Metode Penelitian Sejarah*. Logos.
- Ajisman, Zubir, Z, Jumhari, & Efrianto A. (2012). *Bunga Rampai Sejarah Sumatra Barat dari Jaman Jepang Hingga Reformasi*. BPSNT Padang Press.
- Alfatiana, L., & Wulandari, A. (2023). Di Balik Layar Penyelundupan: Tokoh-Tokoh dalam Perdagangan Gelap Pemerintah Republik di Singapura, 1947-1949. *Lembaran Sejarah*, 18(1), 43. <https://doi.org/10.22146/lembaran-sejarah.80452>
- Amura, H. (1979). *Sejarah Revolusi Kemerdekaan di Minangkabau 1945-1950*. Pustaka Antara.
- Anderson, B. R. O. (1972). *Java in a Time of Revolution: Occupation and Resistance*. Cornell University Press.
- Asnan, G. (2003a). *Sejarah Perjuangan Rakyat Kabupaten Solok: 1945-1949*. DHD 45 Sumbang.
- Asnan, G. (2023b). 200 Tahun Perang Padri. Tanda Baca.
- Bakar, R. A. (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Suka Press UIN Sunan Kalijaga.
- Bing Siong, H. (2001). The Indonesian Need of Arms After the Proclamation of Independence. *Bijdragen Tot de Taal-, Land- En Volkenkunde*, 157(4), 799-830. <https://doi.org/10.1163/22134379-90003793>
- Boediono. (2016). *Ekonomi Indonesia Dalam Lintasan Sejarah*. Mizan Pustaka.
- Elvira, M. (2020). Bandit-Bandit Revolusi: Kekerasan Terhadap Rakyat Sipil Selama Perang di Sumatera Barat 1945-1949. *Al-Qalam: Jurnal Penelitian Agama Dan Sosial Budaya*, 25(3), 583-590. <https://doi.org/10.31969/alq.v25i3.794>
- Erniwati. (2011). *Cina Padang dalam Dinamika Masyarakat Minangkabau: dari Revolusi sampai Reformasi*. Universitas Indonesia.

- Fatimah, S. (2022). Siti Manggopoh: Female Warriors from the Coastal Land of Minangkabau in The 1908 Belasting War. *Social Studies Conference Proceedings*, 174–196. <https://doi.org/10.20527/sscp.vi.598>
- Fitri, H., Asnan, G., & Nopriyasman. (2022). Historiografi Perang Kamang 1908: Kategorisasi Penulisan Oleh Orang Minang. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 9(10), 3699–3712. <https://doi.org/doi:10.31604/jips.v9i10.2022.3699-3712>
- Gottschalk, L. (2008). *Mengerti Sejarah*. UI Press.
- Habibuna, M. R., & Efrizal, E. (2022). Studi Tentang Tugu Peringatan Perang Kamang Di Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam. *Serupa The Journal of Art Education*, 11(1), 69–77. <https://doi.org/10.24036/stjae.viii.117979>
- Hati, P. C. (2018). Dakwah Pada Masyarakat Minangkabau (Studi Kasus Pada Kaum Padri). *Islamic Communication Journal*, 3(1), 105. <https://doi.org/10.21580/icj.2018.3.1.2681>
- Husein, A., Muntjak, K. S., Sjoeb, Djalil, J., Syafiar, Abbas, B., Amin, A., & Djohan. (1978a). *Sejarah Perjuangan Kemerdekaan di Minangkabau/Riau 1945-1950 Jilid II*. Badan Pemurnian Sejarah Indonesia-Minangkabau (BPSIM).
- Husein, A., Muntjak, K. S., Sjoeb, Djalil, J., Syafiar, Abbas, B., Amin, A., & Djohan. (1978b). *Sejarah Perjuangan Kemerdekaan RI di Minangkabau 1945-1950 Jilid I*. Badan Pemurnian Sejarah Indonesia-Minangkabau (BPSIM).
- Imadudin, Ii. (2018). “Revolusi Dalam Revolusi”: Tentara, Laskar, Dan Jago Di Wilayah Karawang 1945-1947. *Patanjala : Jurnal Penelitian Sejarah Dan Budaya*, 10(1), 35–50. <https://doi.org/10.30959/patanjala.v10i1.330>
- Iskandar, M., Said, Y., & Wulandari, T. (1998). *Peran Desa Dalam Perjuangan Kemerdekaan Di Sumatra Barat 1945-1950*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI.
- Kahin, A. R. (2005). *Dari pemberontakan ke integrasi : Sumatra Barat dan politik Indonesia 1926 - 1998*. Yayasan Obor Indonesia.
- Kementerian Penerangan. (1953). *Republik Indonesia Propinsi Sumatera Tengah*.
- Khusniawati, S., Fathoni, W., Muhammad, S., & Ma'ruf, M. I. (2021). Kaum Padri dalam Pembaharuan Islam dan Muhammadiyah di Minangkabau. *Jurnal Studi Islam Dan Kemuhammadiyah (JASIKA)*, 1(1), 29–38. <https://doi.org/10.18196/jasika.viii.3>
- Limpach, R. (2023). *Kekerasan Ekstrem Belanda di Indonesia: Perang Kemerdekaan Indonesia 1945-1949*. Pustaka Obor Indonesia.
- Lionar, U., Mulyana, A., & Yulifar, L. (2020). Plakat Panjang Hingga Perang Kamang: Gerakan Rakyat Minangkabau Menentang Pajak Kolonial Belanda. *Historis: Jurnal Kajian, Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan Sejarah* 5.2, 5(2), 113–122. <https://doi.org/10.31764/historis.vXiY.3409>
- Moerdiono. (1997). *Denyut Nadi Revolusi Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama.
- Nasution, A.H. (1977). *Sekitar Perang Kemerdekaan Jilid 2*. DISJERAH-AD dan Penerbit Angkasa.
- Nationaal Archief. NL-HaNA_2.24.04.03 inventaris number 10434
- Nationaal Archief. NL-HaNA 2.24.04.01 inventaris number 4288
- Ningsih, W. L. (2023). Tujuan Blokade Ekonomi Belanda terhadap Indonesia. *Kompas*. <https://www.kompas.com/stori/read/2023/10/19/180000179/tujuan-blokade-ekonomi-belanda-terhadap-indonesia?page=all>
- Oostindie, G. (2016). *Serdadu Belanda di Indonesia 1945-1950: Kesaksian Perang Pada Sisi Sejarah yang Salah*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia KITLV-Jakarta.
- Poesponegoro, Djoened, M., & Notosusanto, N. (2010). *Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI: Zaman Jepang dan Zaman Republik*. Balai Pustaka.
- Purwanto, B., Frakking, R., Wahid, A., Klinken, G., Eickhoff, M., Yulianti, & Hoogenboom, I. (2023). *Revolutionary Worlds: Local Perspectives and Dynamics during the Indonesian Independence War, 1945-1949*. Amsterdam University Press. <https://doi.org/10.5117/9789463727587>
- Reid, A. (1996). *Revolusi Nasional Indonesia*. Pustaka Sinar Harapan.
- Ricklefs, M. C. (2008). *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*. Serambi.
- Robert, C. (1988). Opium and The Indonesian Revolution. *Modern Asian Studies*, 22(4), 701–722. <https://doi.org/10.1017/S0026749X00015717>
- Setiawan, L., Mahardika, A. A., & Rulita, D. (2023). *Tonggak Awal Anggaran Negara Berdaulat Nota Keuangan 1950-1951*. Kementerian Keuangan RI.
- Suwondo, B. (1979). *Sejarah Masa Revolusi Fisik Daerah Riau*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Proyek Inventaris dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah.
- UUD RI. (1948a). *Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1948 tentang Pemberantasan Penimbunan Barang*

- Penting. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/25876/uu-no-29-tahun-1948>
- UUD RI. (1948b). *Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1948 tentang Pengumpulan Bahan Makanan dan Distribusi*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/63010/pp-no-5-tahun-1948>
- UUD RI. (1948c). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1948 tentang Menghitung Ternak*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/63033/pp-no-15-tahun-1948>
- Wahid, A., Veer, A. van der, Hoek, A. L., Harapap, A., Erniwati, F., Sasi, G. A., Klinken, G. van, Ibrahim, J., Bent, M. van der, Eickhoff, M., Umar, M., Zara, M. Y., Frakking, R., Husain, S. B., Ahmad, T., & Irsyam, T. W. M. (2023). *Dunia Revolusi: Perspektif dan Dinamika Lokal Pada Masa Perang Kemerdekaan Indonesia, 1945-1949*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Wulandari, E. S. (2022). Kebijakan Ekonomi Indonesia Tahun 1948-1949. *Jurnal Pendidikan Sejarah: Media Kajian Pendidikan Sejarah Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1(2). <https://doi.org/10.53682/jpsunima.vii2.3358>
- Yuniarni. (2012). Siti Manggopoh: Sebuah Catatan Sejarah Dalam Pertunjukan Karya Seni Teater. *Jurnal Ekspresi Seni*, 14(2), 249-264. <http://dx.doi.org/10.26887/ekse.v14i2.231>
- Zainun, N. (2019). *Logistik Tentara Nasional Indonesia Dalam Perang Gerila Di Jawa Tengah 1947-1949*. Universiti Sains Malaysia.
- Zed, M. (2003). *Kepialangan Politik dan Revolusi: Palembang 1900-1950*. LP3ES Indonesia.
- Zed, M., Amri, E., & Etmihardi. (2002). *Sejarah Perjuangan Kemerdekaan: 1945-1949 di Kota Padang dan Sekitarnya*. Yayasan Citra Budaya Indonesia.
- Zubir, Z., & Rismadona. (2014). *Sumpur Kudus: Dalam Perjalanan Sejarah Minangkabau Tahun 1942-1965*. Badan Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) Padang.